

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kondisi perekonomian sering dianggap sebagai indikator utama yang mencerminkan kualitas suatu negara. Perekonomian yang stabil dan berkembang mencerminkan keberhasilan negara dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya, baik sumber daya alam, manusia, maupun modal. Sebuah negara dengan kondisi ekonomi yang kuat memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, menyediakan infrastruktur yang memadai, serta menciptakan stabilitas ekonomi dan politik.²

Salah satu tujuan utama dari setiap negara adalah meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan peningkatan produktivitas yang tidak hanya menghasilkan pendapatan yang lebih besar tetapi juga menciptakan peluang kerja yang lebih banyak. Hal ini penting untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat.³ Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi.⁴

² Sukirno, Sadono. *Pengantar Teori Makroekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 45

³ Todaro, Michael P. & Stephen C. Smith, *Economic Development*, (Harlow: Pearson, 2015), hlm. 112

⁴ Ari Muliarta Ginting dan Rasbin, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Krisis", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol.1, No. 2, 2010, hlm. 281

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat diukur melalui tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), yang mencerminkan nilai total produksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun, dan dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode tersebut. Sementara itu, PDB atas dasar harga berlaku dihitung berdasarkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam periode yang sama, tetapi dihitung menggunakan harga yang berlaku saat penilaian dilakukan. PDB berdasarkan harga berlaku berguna untuk menganalisis perubahan dan struktur ekonomi, sedangkan PDB berdasarkan harga tetap digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.⁵

Tabel 1.1
Data Produk Domestik Bruto (PDB) Bulanan
Berdasarkan Harga Konstan Periode 2020-2023

No	Bulan	Tahun (dalam Milyar Rupiah)			
		2020	2021	2022	2023
1	Januari	928.653	891.999	936.237	983.206
2	Februari	897.997	893.409	938.150	985.436
3	Maret	876.377	899.037	944.946	992.899
4	April	863.793	916.740	965.684	1.015.777
5	Mei	860.244	924.913	975.451	1.026.062
6	Juni	865.732	931.412	983.306	1.033.938
7	Juli	899.290	934.690	988.816	1.037.930
8	Agustus	908.576	939.002	993.171	1.042.098
9	September	912.618	942.800	995.937	1.044.965
10	Oktober	905.153	948.180	996.861	1.046.530
11	November	903.420	949.381	996.648	1.046.795
12	Desember	901.149	948.496	995.040	1.045.759

⁵ Putu Hari Kurniawan dkk, “Kedigdayaan Produk Domestik Bruto: Aspek Sejarah dan Popularitas di Masa Depan”, *Dialektika Publik*, Vol.3, No. 2, 2019, hlm. 39

No	Bulan	Tahun (dalam Milyar Rupiah)			
		2020	2021	2022	2023
	Total	10.722.999	11.120.059	11.710.247	12.301.393

Sumber: *Badan Pusat Statistik (Data Diolah)*

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 PDB Indonesia mengalami penurunan karena adanya pandemi Covid-19. Sebelum terjadi pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar lima persen (y-on-y). Pandemi Covid-19 yang mulai dirasakan Indonesia di awal 2020, memicu kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari jumlah PDB tahun 2020 yaitu 10.722.999 miliar rupiah. Ekonomi Indonesia mulai tumbuh positif (y-on-y) pada tahun 2021 dengan total PDB 11.120.059 miliar rupiah. Pada tahun 2022 PDB Indonesia terus mengalami pertumbuhan dengan total PDB 11.710.247 miliar rupiah dan terus tumbuh solid hingga tahun 2023 dengan total PDB 12.301.393 miliar rupiah.

Indonesia berhasil mencatatkan konsistensi pertumbuhan di tengah melambatnya ekonomi dunia pada 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 sebesar 5,31 persen merupakan yang tertinggi sejak 2014. Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh lapangan usaha mencatatkan pertumbuhan positif. Tiga lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi yaitu kategori Transportasi dan Pergudangan (19,87 persen), Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (11,97 persen), dan Industri Pengolahan (4,89 persen). Dari sisi pengeluaran, seluruh komponen PDB berhasil tumbuh positif kecuali konsumsi pemerintah. Ekonomi menguat salah satunya ditopang dari surplus neraca

perdagangan luar negeri.⁶ Pada tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05 persen. Meskipun sedikit lebih lambat daripada tahun 2022 yang mencapai 5,31 persen, tetapi selurung lapangan usaha masih mencatatkan pertumbuhan yang positif. Adanya penyelenggaraan event internasional, seperti Piala Dunia U-17 tahun, pertemuan KTT ASEAN, penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, dan persiapan pemilihan umum menjadi faktor pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023.⁷

Menurut teori Keynes sebagaimana dikutip oleh Mica (2024) ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya permintaan agregat, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.⁸ Kebijakan moneter merupakan salah satu instrument utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengendalikan perekonomian melalui bank sentral. Kebijakan moneter berperan dalam mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga yang pada akhirnya mempengaruhi investasi dan konsumsi. Peningkatan investasi dan konsumsi ini akan meningkatkan permintaan agregat yang kemudian akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan moneter yang dikelola oleh Bank Indonesia berperan penting dalam mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas nilai tukar, dan memastikan kestabilan harga, yang merupakan elemen dasar bagi pemulihan ekonomi dan

⁶ Badan Pusat Statistik, *Laporan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: 2022).

⁷ Badan Pusat Statistik, *Laporan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: 2023).

⁸ Mica Siar Meiriza, "Teori Ekonomi Keynesian Mengenai Inflasi dan Pengaruhnya Terhadap Ekonomi Modern", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 2, 2024, hlm. 2434-2435

kelancaran aktivitas ekonomi.⁹ Dengan mengarahkan kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memastikan stabilitas, PDB dapat kembali bergerak positif, mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi secara menyeluruh. Perlambatan ekonomi domestik dapat dilihat dari melambatnya laju pertumbuhan PDB. Penyebab perlambatan PDB bisa disebabkan berbagai faktor, seperti melemahnya ekonomi global, dampak pandemi, dan konflik antarnegara.¹⁰ Kondisi ini menuntut pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan sinergi antara kebijakan moneter dan fiskal guna mendukung pemulihan ekonomi.

Bank sentral yaitu Bank Indonesia bisa menerapkan kebijakan moneter dengan berbagai instrumen, termasuk pengaturan suku bunga dan operasi pasar terbuka. Sebagai contoh, peningkatan suku bunga acuan dapat mengurangi jumlah uang beredar, sehingga menekan inflasi, sementara penurunan suku bunga bertujuan untuk mendorong investasi dan konsumsi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, efektivitas kebijakan moneter sangat tergantung pada kemampuan untuk merespons perubahan kondisi ekonomi domestik dan global, seperti perubahan nilai tukar dan fluktuasi harga komoditas internasional.¹¹

Stabilitas ekonomi makro melalui kebijakan moneter juga tercermin dari peningkatan efisiensi sektor keuangan. Rasio uang beredar terhadap PDB

⁹ Ayu Syafitri Sinaga dkk, "Peranan Instrumen Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Periode 2012-2021", *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)*, Vol. 1, No 2, 2022, hlm. 63

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Sulis Septiani dkk, "Peran Kebijakan Moneter di Indonesia dalam Menghadapi Inflasi", *Journal of Economics, Assets, and Evaluation*, Vol. 1, No. 3, 2024, hlm. 3-4

(M2/GDP) dan rasio kredit terhadap PDB merupakan indikator yang mencerminkan keberhasilan kebijakan moneter dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi sektor swasta. Sebagai contoh, penurunan rasio suku bunga yang didukung oleh kebijakan moneter akomodatif dapat memperkuat daya beli masyarakat dan mendukung investasi produktif.¹² Dalam jangka panjang, hal ini dapat meningkatkan output ekonomi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, dan mengurangi tingkat pengangguran, yang semuanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Kebijakan moneter ekspansif dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, meskipun berpotensi meningkatkan inflasi dan memperburuk neraca pembayaran. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif dapat membantu menjaga stabilitas harga dan memperbaiki neraca pembayaran, tetapi sering kali berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pemilihan jenis kebijakan moneter yang diterapkan bergantung pada situasi ekonomi dan prioritas masalah yang sedang dihadapi, seperti pengendalian inflasi atau stimulasi pertumbuhan.¹³

Sistem moneter di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu operasi moneter konvensional dan operasi moneter syariah. Penerapan kedua sistem ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 16/12/PBI/2014 yang dikeluarkan

¹² Muhammad Ridhwan Assel, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Stabilitas Ekonomi Serta Imbasnya Terhadap Kinerja Sektor Keuangan Di Indonesia (Pendekatan Cointegration, Error Correction Model Dan Financial Deepening)", *Jurnal Citra Ekonomika*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 57

¹³ Ayu Syafitri Sinaga dkk, "Peranan Instrumen Kebijakan...", hlm. 63

pada 24 Juli 2014.¹⁴ Operasi moneter syariah (OMS) bertujuan untuk mengendalikan likuiditas perbankan syariah dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹⁵ Dalam pelaksanaannya, OMS melibatkan kegiatan seperti Operasi Pasar Terbuka Syariah (OPTS), penyediaan fasilitas simpanan (*Standing Facility*) dan Pasar Uang Antarbank Syariah yang dirancang untuk menjaga kestabilan ekonomi dan keuangan di Indonesia. Dengan adanya OMS, Bank Indonesia dapat mempengaruhi kecukupan likuiditas di sektor perbankan syariah, yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi jumlah lembaga keuangan syariah, variasi produk, maupun peningkatan literasi masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah. Namun demikian, kontribusinya terhadap sistem keuangan nasional masih tergolong terbatas. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), market share keuangan syariah Indonesia per Desember 2023 baru mencapai sekitar 10,95% dari total aset industri jasa keuangan.¹⁶ Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ekosistem syariah terus berkembang, skala dan jangkauannya belum sebanding dengan sistem keuangan konvensional.

¹⁴ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha dalam Sistem Keuangan Syariah*. (Jakarta: Bank Indonesia).

¹⁵ Eva Misfah Bayuni dan Popon Srisusilawati, "Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 20-21

¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia*, (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 14

Kebijakan moneter syariah berperan penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme transmisi ke sektor riil. Instrumen seperti Sukuk Bank Indonesia (SukBI), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) berfungsi mengatur likuiditas perbankan syariah, yang berdampak pada kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor produktif. Ketika pembiayaan meningkat, maka konsumsi, investasi, dan aktivitas produksi pun tumbuh, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB).

SukBI merupakan sukuk yang diterbitkan oleh BI dengan akad utama Al-Musarakah Al-Muntahiyah bi al-tamlik, yaitu skema kontrak persekutuan yang diikuti oleh pembelian porsi oleh salah satu pihak pada saat kontrak atau jatuh tempo.¹⁷ Penerbitan SukBI pertama kali dilakukan pada 21 Desember 2018 sebagai instrumen kontraksi likuiditas dengan tenor mulai dari 1 minggu hingga 12 bulan, menggantikan instrumen sebelumnya seperti RR SBSN tenor 1 bulan dan SBIS untuk tenor 6 sampai 12 bulan. Instrumen ini menggunakan underlying asset berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan/atau sukuk global yang dimiliki BI, sehingga memiliki karakteristik tradable, dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar bank, dan dapat diagunkan kepada BI.¹⁸

¹⁷ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 20/14/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/5/PBI/2018 Tentang Operasi Moneter*, (Jakarta: Bank Indonesia).

¹⁸ Bank Indonesia, *Perluasan Penggunaan Instrumen Sukuk Bank Indonesia (SUKBI)* 16 April 2021, <https://bicara131.bi.go.id/knowledgebase/article/KA-01063/en-us>, diakses pada tanggal 18 April 2025.

Tabel 1.2
Data Sukuk Bank Indonesia (SukBI) Bulanan
Periode 2020-2023

No	Bulan	Tahun (dalam Milyar Rupiah)			
		2020	2021	2022	2023
1	Januari	25.948	41.467	64.729	65.968
2	Februari	25.888	44.754	66.219	55.218
3	Maret	24.408	41.935	66.501	54.754
4	April	20.891	39.256	57.873	43.696
5	Mei	21.920	49.110	71.340	56.146
6	Juni	27.390	51.360	65.160	53.592
7	Juli	26.929	52.628	67.750	49.771
8	Agustus	21.645	54.783	67.482	46.168
9	September	28.655	57.777	46.209	57.231
10	Oktober	41.855	51.805	49.730	56.836
11	November	32.035	59.026	50.871	47.935
12	Desember	42.571	61.112	53.123	63.363
	Total	340.135	605.013	726.987	650.678

Sumber: *Bank Indonesia (Data Diolah)*

Berdasarkan tabel 1.2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah volume transaksi Sukuk Bank Indonesia (SukBI) pada tahun 2020-2022 mengalami peningkatan secara terus menerus, namun pada tahun 2023 jumlah volume transaksi SukBI justru mengalami penurunan. Pada tahun 2020 jumlah volume transaksi SukBI di Indonesia mencapai angka 137.637 milyar rupiah. Selama pandemi Covid-19 permintaan terhadap pembiayaan syariah mengalami penurunan sehingga bank syariah mengalihkan kelebihan likuiditasnya kedalam instrument moneter syariah yang bersifat absorpsi.¹⁹ Pada tahun 2021 volume transaksi SukBI sebesar 605.013 milyar rupiah naik 78% dari tahun sebelumnya. Peningkatan volume transaksi ini sejalan dengan kebijakan fiskal dan moneter

¹⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia*, (Jakarta: OJK, 2020), hlm. 96

yang akomodatif dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).²⁰ Pada tahun 2022 volume transaksi SukBI mengalami kenaikan sebesar 726.987 milyar rupiah, naik 20% dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini tidak signifikan tahun sebelumnya dikarenakan penurunan kegiatan operasi moneter syariah oleh penurunan *excess* likuiditas perbankan syariah seiring peningkatan pembiayaan ke sektor riil.²¹ Pada tahun 2023 volume transaksi SukBI mengalami kenaikan sebesar 650.678 milyar rupiah, turun 10% dari tahun sebelumnya. Penurunan jumlah transaksi ini terjadi karena perlambatan dan divergensi pertumbuhan ekonomi global.²²

FASBIS merupakan fasilitas penyimpanan bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah di Bank Indonesia sebagai bagian dari Operasi Moneter Syariah. Fasilitas ini berfungsi menyerap kelebihan likuiditas, terutama saat pertumbuhan ekonomi meningkat. Peningkatan FASBIS cenderung menekan laju pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya berdampak pada penurunan PDB.²³ Oleh karena itu, Bank Indonesia berupaya menjaga keseimbangan likuiditas perbankan dengan tujuan kondisi ekonomi tetap stabil.

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia*, (Jakarta: OJK, 2021), hlm. 96

²¹ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia*, (Jakarta: OJK, 2022), hlm. 105

²² Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia*, (Jakarta: OJK, 2023), hlm. 120

²³ Nur Fitri Eka Asbarini dkk, "Analisis Pengaruh Operasi Moneter Konvensional dan Operasi Moneter Syariah Terhadap Produk Domestik Bruto Di Indonesia", *Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol.1, No.4, 2022, hlm.

Tabel 1.3
Data Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) Bulanan
Periode 2020-2023

No	Bulan	Tahun (dalam Milyar Rupiah)			
		2020	2021	2022	2023
1	Januari	9.783	18.871	31.899	17.106
2	Februari	13.386	14.455	27.601	16.850
3	Maret	16.136	17.638	26.785	20.890
4	April	17.527	14.471	20.677	23.690
5	Mei	12.444	17.002	18.620	15.285
6	Juni	18.303	23.153	32.318	18.868
7	Juli	14.461	20.120	13.455	27.358
8	Agustus	26.450	18.504	11.957	20.098
9	September	33.166	19.678	23.789	17.181
10	Oktober	16.525	29.159	14.015	19.250
11	November	29.630	25.771	13.906	17.882
12	Desember	18.506	42.998	26.605	21.598
	Total	226.317	261.820	261.627	236.056

Sumber: *Bank Indonesia (Data Diolah)*

Bersasarkan tabel 1.3 di atas dapat diketahui bahwa perkembangan Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) di Indonesia dari tahun 2020-2023 mengalami pergerakan yang berfluktuatif. Pada tahun 2020 jumlah transaksi FASBIS mengalami penurunan karena adanya wabah COVID-19 dengan jumlah transaksi 226.317 milyar rupiah. Namun pada tahun 2021 jumlah transaksi FASBIS mulai mengalami mengalami kenaikan dengan jumlah transaksi sebesar 261.820 milyar rupiah. Transaksi FASBIS mengalami sedikit penurunan pada tahun 2022 dengan jumlah transaksi sebesar 261.627 milyar rupiah dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2023 dengan jumlah transaksi sebesar 236.056 milyar rupiah.

Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) berfungsi sebagai instrumen moneter yang sangat penting dalam sistem keuangan syariah di Indonesia, memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk melakukan transaksi jangka

pendek tanpa melibatkan unsur riba, gharar, dan maysir. Melalui PUAS, bank syariah dapat mengelola likuiditas dengan lebih efisien, baik dalam menghadapi surplus maupun defisit dana. Ketika terdapat kenaikan bagi hasil di PUAS, hal ini akan berdampak positif pada tingkat pertumbuhan ekonomi. Kenaikan tingkat bagi hasil PUAS berpotensi meningkatkan tingkat bagi hasil pembiayaan di bank syariah, terutama melalui akad Al-Musyarakah dan Al-Mudharabah. Dengan meningkatnya tingkat bagi hasil pembiayaan, masyarakat akan lebih tertarik untuk memanfaatkan produk pinjaman yang ditawarkan oleh bank syariah untuk keperluan produktif, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.²⁴

PUAS juga berperan dalam pengendalian moneter di Indonesia, di mana Bank Indonesia dapat mengatur jumlah uang yang beredar dan mempengaruhi suku bunga secara tidak langsung melalui mekanisme pasar uang syariah. Dengan adanya PUAS, bank syariah memiliki sarana yang lebih baik untuk menyalurkan dana ke sektor-sektor produktif, sehingga meningkatkan investasi dan konsumsi.²⁵ Hal ini menciptakan efek pengganda pada perekonomian, di mana setiap tambahan pembiayaan dapat menghasilkan output yang lebih besar. Oleh karena itu, PUAS tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan likuiditas tetapi juga sebagai pendorong utama dalam pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.²⁶

²⁴ Rifky Yudi Setiawan dan Karsinah, "Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter dalam Mempengaruhi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Economics Development Analysis Journal*, Vol.5, No.4, 2016, hlm. 468

²⁵ Devi Triana dkk, "Penerapan Kebijakan Ekonomi Moneter Islam Pada Sistem Perekonomian Indonesia", *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2, No. 6, 2024, hlm. 4

²⁶ Rifky Yudi Setiawan dan Karsinah, "Mekanisme Transmisi...", hlm. 468

Tabel 1.4
Data Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) Bulanan
Periode 2020-2023

No	Bulan	Tahun (dalam Milyar Rupiah)			
		2020	2021	2022	2023
1	Januari	613	320	3.275	845
2	Februari	985	281	4.825	2.165
3	Maret	347	719	3.998	1.985
4	April	142	579	2.118	1.315
5	Mei	682	538	3.883	1.680
6	Juni	753	795	1.061	2.985
7	Juli	1.287	1.080	712	3.030
8	Agustus	327	550	905	2.005
9	September	275	2.840	1.275	3.050
10	Oktober	1155	4.825	595	2.460
11	November	828	8.920	1.140	2.900
12	Desember	1.160	9.776	2.109	3.325
	Total	10.574	33.244	27.918	29.768

Sumber: Bank Indonesia (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 1.4 di atas dapat diketahui bahwa perkembangan volume transaksi Pasar Uang Antarbank Syaiah (PUAS) di Indonesia dari tahun 2020-2023 mengalami pergerakan yang berfluktuatif. Pada tahun 2020 volume transaksi PUAS di Indonesia menjadi yang terendah dengan jumlah transaksi 10.574 milyar rupiah, penurunan volume transaksi tersebut disebabkan karena gejolak ekonomi yang disebabkan pandemi COVID-19.²⁷ Pada tahun 2021 transaksi PUAS mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya sebesar 33.244 milyar rupiah, peningkatan ini didorong oleh semakin tingginya transaksi perbankan seiring dengan pemulihan ekonomi domestic.²⁸ Namun pada tahun 2022 volume PUAS mengalami penurunan

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia*, (Jakarta: OJK, 2020)

²⁸ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia*, (Jakarta: OJK, 2021)

dengan jumlah transaksi sebesar 27.916 milyar, penurunan tersebut disebabkan karena adanya pengetatan likuiditas perbankan syariah, sejalan dengan kenaikan BI7DRR dan normalisasi rasio Giro Wajib Minimum (GWM) rupiah.²⁹ Pada tahun 2023 volume transaksi PUAS mengalami sedikit pertumbuhan dan belum mampu tumbuh signifikan dengan total transaksi sebesar 29.768 milyar rupiah, hal ini disebabkan karena adanya pengetatan pada likuiditas perbankan syariah relatif terhadap periode COVID-19, sejalan dengan melambatnya DPK di tengah pesatnya pembiayaan ke sektor riil dalam rangka pemulihan ekonomi.³⁰

Instrumen seperti Sukuk Bank Indonesia (SukBI), Fasilitas Simpanan Syariah Bank Indonesia (FASBIS), dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) merupakan bagian dari kebijakan moneter syariah yang dirancang untuk mendukung stabilitas sistem keuangan dan pengelolaan likuiditas perbankan. Melalui SukBI, bank umum syariah dan unit usaha syariah menyerap kelebihan likuiditas jangka pendek dari masyarakat, sehingga menciptakan stabilitas moneter yang kondusif bagi dunia usaha. FASBIS berfungsi sebagai instrumen penempatan dana berlebih yang memberikan alternatif penyimpanan bagi bank syariah, menjaga stabilitas likuiditas dan memperkuat kepercayaan dalam sistem keuangan. Sementara itu, PUAS memfasilitasi penempatan dana antarbank dalam bentuk sertifikat syariah, mendorong efisiensi distribusi dana antar lembaga keuangan syariah. Melalui optimalisasi ketiga instrumen

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia*, (Jakarta: OJK, 2022)

³⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia*, (Jakarta: OJK, 2023)

tersebut, Bank Indonesia tidak hanya mengelola likuiditas, tetapi juga memperkuat fungsi intermediasi keuangan syariah. Total agregat pembiayaan yang dihasilkan berkontribusi langsung terhadap peningkatan aktivitas sektor riil, khususnya dalam mendukung produksi barang dan jasa.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayu Safitri dkk (2023), instrumen kebijakan moneter syariah FASBIS bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.³¹ Dalam penelitian Rifky Yudi Setiawan dan Karsinah (2016), instrument kebijakan moneter PUAS juga berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.³² Dalam penelitian Arsyad dkk (2025) SukBI berpengaruh signifikan terhadap inflasi di Indonesia.³³ Penelitian ini memperbarui kajian sebelumnya dengan menganalisis pengaruh ketiga instrumen tersebut secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2020–2023, guna memberikan gambaran terbaru mengenai pengaruh kebijakan moneter syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Instrumen Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 2020-2023”**.

³¹ Ayu Syafitri Sinaga dkk, “Peranan Instrumen Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sumatera Utara Periode 2012-2021”, *Journal of Management, Economic and Accounting (JMEA)*, Vol. 1, No 2, 2022, hlm. 62-71

³² Rifky Yudi Setiawan dan Karsinah, “Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter dalam Mempengaruhi Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”. *Economics Development Analysis Journal*, Vol.5, No.4, 2016, hlm. 460-474

³³ Rafi Pramana Arsyad dkk, “Pengaruh Sukuk Bank Indonesia dan BI Rate Terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2020-2023”, *Jurnal Ilmiah Akutansi*, Vol. 6, No. 1, 2025

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Penelitian

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama periode 2020-2023 menunjukkan tren positif, meskipun terdapat tantangan dari dinamika global seperti fluktuasi harga komoditas, tekanan inflasi, dan perubahan kebijakan moneter di negara-negara maju. Dalam konteks ini, peran instrumen kebijakan moneter syariah seperti Sukuk Bank Indonesia (SukBI), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) perlu dikaji lebih dalam untuk memahami kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui indikator Produk Domestik Bruto (PDB).

Untuk memfokuskan kajian agar penelitian ini lebih terarah, maka peneliti memberikan batasan masalah yang memfokuskan pada pengaruh SukBI, FASBIS, dan PUAS terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sehingga dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder yang bersumber dari Bank Indonesia (BI) tahun 2020-2023.

C. Rumusan Masalah

1. Apakah Sukuk Bank Indonesia (SukBI) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020-2023?
2. Apakah Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020-2023?
3. Apakah Pasar Uang Antarbank Sayriah (PUAS) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020-2023?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh Sukuk Bank Indonesia (SukBI) terhadap Petumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020-2023.
2. Untuk menguji pengaruh Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) terhadap Petumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020-2023.
3. Untuk menguji pengaruh Pasar Uang Antabank Sayriah (PUAS) terhadap Petumbuhan Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020-2023.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dijadikan sebagai acuan secara teoritis pada pengembangan teori kebijakan moneter dengan menekankan pada instrument kebijakan moneter syariah seperti Sukuk Bank Indonesia (SukBI), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), dan Pasar Uang Antarbank Syariah Syariah (PUAS) yang dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah (Bank Indonesia)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tentang efektivitas kebijakan moneter syariah dalam mengelola likuiditas perbankan syariah dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini dapat menjadi landasan Bank Indonesia (BI)

sebagai otoritas moneter untuk mengoptimalkan kerangka kebijakan moneter syariah agar lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi serta mendukung stabilitas sistem keuangan Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung untuk dijadikan referensi serta informasi mahasiswa khususnya jurusan ekonomi syariah.

c. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini juga diharapkan dapat bahan tambahan informasi dan bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya, terutama yang berminat untuk mengkaji tentang pengaruh instrument kebijakan moneter syariah terhadap pertumbuhan ekonomi.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini, penulis memberikan tiga variabel independen yaitu, Sukuk Bank Indonesia (SukBI), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), serta satu variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi dengan Produk Domestik Bruto sebagai indikatornya. Pada penelitian ini menggunakan sampel data selama empat tahun dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Diharapkan dengan sampel data selama empat tahun akan cukup merepresentasikan bagaimana pengaruh SukBI, FASBIS, dan PUAS terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

G. Penegasan Variabel

1. Definisi Konseptual

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan nilai total seluruh barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. PDB mencerminkan tingkat pendapatan nasional dan menjadi indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, karena mencerminkan peningkatan kapasitas produksi dan output suatu perekonomian secara keseluruhan.³⁴

b. Sukuk Bank Indonesia (SukBI)

Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan underlying asset berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.³⁵

c. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)

Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank umum syariah, unit usaha syariah, pialang pasar uang rupiah dan valas untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam bentuk Rupiah.³⁶

³⁴ Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia: Tinjauan Historis, Teoritis dan Empiris*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 88

³⁵ Bank Indonesia, *Peraturan Bank Indonesia No. 20/14/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia No. 20/5/PBI/2018 Tentang Operasi Moneter*, (Jakarta: Bank Indonesia), hlm. 5.

³⁶ Eva Misfah Bayuni dan Popon Srisusilawati, "Kontribusi Instrumen Moneter Syariah Terhadap Pengendalian Inflasi Di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 14

d. Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)

Pasar Uang Antarbank Syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk melakukan transaksi pinjam meminjam dana jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah³⁷

2. Definisi Operasional

a. Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah total nilai tambah atau nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi seluruh pelaku ekonomi dalam suatu negara. PDB harga konstan dihitung berdasarkan pengeluaran akhir, yaitu konsumsi (C), investasi (I), belanja pemerintah (G), ekspor (X), dan impor (M), dengan menggunakan harga tetap pada satu tahun tertentu.³⁸ Dalam penelitian ini, data PDB diperoleh dari BPS dalam bentuk bulanan dari Januari 2020 sampai Desember 2023 dengan satuan nilai dalam miliar rupiah.

b. Sukuk Bank Indonesia (SukBI)

Sukuk Bank Indonesia (SukBI) merupakan instrumen moneter syariah yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk menyerap kelebihan likuiditas dari lembaga keuangan syariah.³⁹ Dalam penelitian ini, data

³⁷ Nadia Konita dkk, “Pasar Uang Antar Bank Dengan Prinsip Syariah”, *Jurnal Pijar*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 85-86

³⁸ Tedy Herlambang dkk, *Ekonomi Makro: Teori, Analisis, dan Kebijakan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 18

³⁹ Arsyad dkk, “Pengaruh Sukuk Bank Indonesia Dan Bi Rate Terhadap Inflasi di Indonesia Periode 2020-2023”, *Jurnal Ilmiah Akutansni*, Vol 6, No.1, 2025, hlm. 347

SukBI diambil dari situs resmi Bank Indonesia dan disajikan dalam bentuk angka bulanan dari Januari 2020 hingga Desember 2023, dengan satuan nilai dalam miliar rupiah.

c. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)

FASBIS adalah fasilitas penempatan dana syariah dari bank umum syariah atau unit usaha syariah di Bank Indonesia, sebagai salah satu instrumen pengelolaan likuiditas jangka pendek. Dalam penelitian ini, data FASBIS diambil dari situs resmi Bank Indonesia dan disajikan dalam bentuk angka bulanan dari Januari 2020 hingga Desember 2023, dengan satuan nilai dalam miliar rupiah.⁴⁰

d. Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS)

Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) merupakan mekanisme transaksi keuangan antar lembaga keuangan syariah yang bertujuan untuk mengelola kebutuhan likuiditas harian berdasarkan prinsip syariah.⁴¹ Dalam penelitian ini, data PUAS diperoleh dari situs resmi Bank Indonesia dan disajikan dalam bentuk angka bulanan dari Januari 2020 hingga Desember 2023, dengan satuan nilai dalam miliar rupiah.

⁴⁰ K. Gumay Citra dan A. Suman, “Analisis Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia Pada Periode 2016-2020”, *Jurnal Syarikah*, Vol. 8, No. 2, 2022, hlm. 189.

⁴¹ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/5/PBI/2007 Tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

H. Sistematika Skripsi

Sistematika penulisan skripsi pada penelitian ini akan disajikan dalam 6 bab dan setiap bab akan terdapat sub bab sebagai penjelasan dari bab tersebut. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai a) latar belakang masalah, b) identifikasi masalah, c) rumusan masalah, d) tujuan penelitian, e) batasan masalah, f) manfaat penelitian, g) penegasan istilah, h) sistematika penulisan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai a) deskripsi teori (teori-teori yang terkait dengan variabel pada judul penelitian), b) penelitian terdahulu, c) kerangka konseptual, d) hipotesis penelitian.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai a) pendekatan dan jenis penelitian, b) populasi, sampling dan sampel penelitian, c) sumber data,

variabel dan skala pengukuran, d) teknik pengumpulan data, e) teknik analisis data.

4. BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai a) Gambaran objek penelitian, b) hasil penelitian.

5. BAB V

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian.

6. BAB VI

PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai a) kesimpulan b) saran.